

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM
YANG TERJADI DI HOTEL**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

KHARISMA OKTAVIANI
NPM. 2110012111085

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 17/PID-02/III-2025

18-4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No.: 17/PID-02/III-2025

Nama : Kharisma Oktaviani
NPM : 2110012111085
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran
Ketertiban Umum yang Terjadi di Hotel

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, SH., M.H. (Pembimbing)



Reg. No.: 17/PID-02/III-2025

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM YANG TERJADI DI HOTEL

Kharisma Oktaviani¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: kharismaoktaviani2@gmail.com

ABSTRACT

In the effort of Satpol PP to maintain and/or restore public order and peace of mind against violations of the Regional Regulation and/or Perkada, non-judicial issuance actions are carried out in accordance with the provisions of the law. As stipulated in Padang City Regional Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Order and Public Order. Several inns and hotels in Padang City are indicated to have violated order, the hotel received guests from an illegal couple who were caught by officers, one of which was a 3-star hotel located in Pondok Village. Research problems: (1) What is the role of the Padang City Satpol PP in law enforcement against public order violations that occur in hotels? (2) What are the obstacles encountered by the Padang City Satpol PP in law enforcement against public order violations that occur in hotels? The type of research used is empirical juridical; data sources come from primary data and secondary data, data collection techniques with document studies and interviews; data is analyzed qualitatively. The results of the study show: (1) The role of Satpol PP in upholding public order and public peace in Padang City is carried out through: the role of early detection and prevention, coaching, counseling, patrolling, security, escort, control and handling of protests; (2) In upholding public order and public peace in Padang City, Satpol PP does not determine a fixed schedule, because supervision and control are carried out based on information from intelligence and community reports.

Keywords: Satpol PP, Public Order, Hotels

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pada dasarnya tidak dapat dihilangkan karena merupakan perbuatan antisosial yang meresahkan masyarakat dalam interaksi sosial dan mendapat tantangan dari pemerintah atau negara.

Namun, secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memungkinkan pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang di langgar tersebut. Pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel terkait Tindakan asusila mencakup perilaku melanggar norma kesusilaan(Adami, 2005).

Tindakan penerbitan non-yudisial dilakukan sesuai dengan undang-undang dalam upaya Satpol PP untuk menjaga dan/atau memulihkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terhadap pelanggaran perda dan perkada. Di kota dengan sekitar 900 ribu penduduk ini, Satpol PP melakukan razia asusila gabungan di beberapa tempat, termasuk tempat hiburan malam dan penginapan, karena dugaan pelanggaran ketertiban. Kepala Satpol PP Kota Padang Mursalim melakukan razia.

Pihaknya melakukan operasi Razia pada hari minggu 9 Oktober 2022 di sejumlah penginapan pun didapati pasangan ilegal yang berhasil dijaring

petugas, di beberapa hotel dan penginapan di kota Padang yaitu hotel berbintang tiga di Kelurahan Pondok. Petugas menemukan 31 pasangan non-kawin ditertibkan; 17 wanita dan 14 laki-laki berhasil diamankan dari berbagai lokasi pemeriksaan (Joglo, 2022).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel?
2. Apakah kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di hotel?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi di hotel.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi di hotel.

II. METODE PENELITIAN

Penulis proposal ini melakukan penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satpol PP Kota Padang dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang Terjadi di Hotel

Penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP menjaga ketentraman dan ketertiban di hotel kota Padang dengan

baik. Hasil wawancara dengan Bapak epriзал.,S.H:

”Tugas-tugas ini memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dampak sosial yang luas. Satpol PP membantu Pemerintah daerah menjalankan perda dan perkara, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, dan melindungi masyarakat sesuai dengan undang-undang.

Selain itu, penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan memberikan pelatihan kepada staf untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Meskipun Satpol PP bekerja dengan baik di hotel Kota Padang.

Tabel 1
Data Laporan Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah satuan polisi pamong praja Kota Padang.

NO	JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	BENTUK PENEGAKAN			JUMLAH KASUS	KETERANGAN
														NON YUSTISI	YUSTISI	DIRSOS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PENYAKIT MASYARAKAT:																	
	1. Diterbitkan di Hotel	14	6	10	7	8	6	65	9	13	1	6	2	137	-	10	147	
	JUMLAH	14	6	10	7	8	6	65	9	13	1	6	2	137	-	10	147	

Terkait dengan ketertiban umum di lingkungan hotel, Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2005 sebenarnya tidak secara spesifik mengatur mengenai tindakan asusila yang terjadi di dalam hotel. Sebaliknya, peraturan ini lebih menyoroti aspek perizinan dan pengelolaan tempat usaha, termasuk hotel dan penginapan.”

B. Kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi di hotel

Dalam pelaksanaan kebijakan Satpol PP terkait pengawasan, hal tersebut telah berjalan dengan baik, tidak menemukan kendala baik yang berasal dari pihak kecamatan, instansi terkait, maupun

faktor eksternal lainnya. Semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, serta sumber daya manusia yang terlatih, telah tersedia dan dalam kondisi yang memadai.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Satpol PP menjaga ketertiban dan ketentraman di Kota Padang melalui deteksi dan pencegahan dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
2. Semua sarana dan personel sudah memadai dan tidak ada kendala.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Daerah Kota Padang menambah jumlah personel Satpol PP agar Satpol PP dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik karena luas wilayah dan populasinya yang besar.
2. Agar Satpol PP mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kota Padang.
3. Agar hotel tanpa izin diawasi lebih ketat oleh pemerintah daerah Kota Padang. Ini termasuk pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa dokumen perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Hotel (IUHP) telah dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

INews Joglo Semar, 2022, *Razia Pasangan Mesum di Hotel, Ada Perempuan Berhijab Panik Sibuk Kenakan Kerudung* Razia Pasangan Mesum di Hotel, Ada Perempuan Berhijab Panik Sibuk Kenakan Kerudung, diakses 10 oktober 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat

C. Sumber Lainnya

Andika Oktaviani Saputra, dkk, 2021, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19' *Jurnal USM law Review*, Volume 4, Nomor 1.

Adibah Amintasria Lasahido, 2021, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provisnsi Jawa Barat, *Jurnal Renaissance*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 830.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., yang telah menjadi pembimbing saya selama bertahun-tahun dan telah memberi saya arahan dan bimbingan dalam menulis karya ilmiah ini.